



BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA PERWAKILAN PROVINSI SULAWESI UTARA

Sub Bagian Humas dan TU Kepala Perwakilan

Manado Post (Hal 8)

Senin, 13 Maret 2023

30 Hari BPK Masuk Mitra

◆Lakukan Pemeriksaan Terperinci Terkait LKPD

EDITOR: ANGEL RUMEEEN

MITRA—Hari ini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perwakilan Sulawesi Utara akan turun ke Kabupaten Minahasa Tenggara (Mitra) terkait dengan LKPD yang telah disampaikan, pekan lalu.

Hal ini disampaikan Sekretaris Kabupaten Mitra David Lalandos. Menurutnya auditor dari BPK dijadwalkan segera melakukan pemeriksaan, mulai

hari ini.

"Mereka akan segera masuk di Pemkab untuk melakukan pemeriksaan. Sudah ada tim disiapkan BPK," kata Lalandos,

dilansir dari Kantor Berita Antara. Ia mengungkapkan, para auditor dari BPK ini nantinya akan melakukan pemeriksaan selama tiga puluh hari. "Pemeriksaan ini lebih terperinci, setelah kami menyampaikan LKPD. Karena sebelumnya ada pemeriksaan pendahuluan yang juga tiga puluh hari," ujarnya.

Lebih lanjut dia meminta seluruh organisasi perangkat



David Lalandos

daerah di lingkungan Pemkab mempersiapkan segala keperluan dalam pemeriksaan tersebut. "Semua jajaran diorganisir untuk kooperatif dalam pemeriksaan, setiap kepala perangkat daerah bertanggung jawab. Termasuk dalam menyiapkan setiap dokumen, dan data pendukung," tandasnya. Sebelumnya dijelaskan Kepala Perwakilan BPK Provinsi Sulawesi Utara keputuhan pen-

yampalan laporan keuangan ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel. "Dengan diterimanya LKPD Unaudited ini, selanjutnya BPK akan melaksanakan pemeriksaan dan menyampaikan laporan hasil pemeriksaan kepada DPRD dan Pemerintah Daerah paling lambat dua bulan sejak diteri-

many LKPD Unaudited. Hal tersebut sesuai dengan penjelasan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menyatakan bahwa Pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan diselesaikan selambat-lambatnya dua bulan setelah menerima laporan keuangan dari pemerintah daerah," pungkasnya. (*)